

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Proses integrasi politik di Irian Jaya (Papua Barat) tidak berjalan mulus. Di era reformasi ini terdeteksi menguatnya pernyataan aspiratif kaum elite Irian Jaya untuk mendapatkan status otonomi yang lebih luas dan lebih khusus. Tuntutan yang mengatasnamakan sebagian besar rakyat Irian Jaya tersebut adalah indikasi yang mengarah ke sifat “separatisme” melalui gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berubahnya nama Propinsi Irian Jaya menjadi Papua merupakan salah satu tuntutan aspiratif dimaksud. (Dibywo Prabowo, 2000)¹

Berdasar hal tersebut, maka penulis menyimpulkan beberapa alasan pemilihan judul, yaitu :

1. Papua (Irian Jaya) ingin merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia.
2. OPM adalah organisasi yang dianggap dapat merusak integrasi bangsa.
3. Tuntutan-tuntutan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.
4. Hal ini belum ada yang membahasnya untuk dijadikan tugas akhir / Skripsi.

Atas dasar diatas, maka penulis mengajukan judul skripsi **“UPAYA OPM MENDAPATKAN DUKUNGAN INTERNASIONAL UNTUK MEMERDEKAKAN PAPUA”**

B. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan sebab-sebab keinginan Papua untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dapat menjelaskan munculnya gerakan separatis OPM dan perjuangan lobby-lobby diluar negeri untuk mencari dukungan internasional.
3. Menjelaskan kampanye politik OPM dalam mencari massa didunia.
4. Menerapkan teori yang telah didapat penulis di bangku kuliah dan menganalisa teori apa yang relevan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang telah, sedang dan akan berlangsung.
5. Untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang digunakan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1), pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (**New York Agreement**) melalui suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama: **United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)**, Papua (Irian Jaya) diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semenjak tanggal diserahkannya Papua (Irian Jaya) kepada Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia sering dihadapkan

dengan berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk masalah adalah tantangan terhadap kegiatan Integrasi Politik di West Papua (Irian Jaya).

Hal ini secara sangat menonjol tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwilligers Korps).²

Dilihat dari keadaan sejak meletusnya pemberontakan pada tahun 1965 atau didahului dengan aktivitas OPM pada tahun 1964 hingga sekarang ini OPM masih menunjukkan aktivitasnya berupa berbagai bentuk kegiatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Ideologi tentang bangsa Papua dan Papua Merdeka terus disosialisasikan oleh OPM melalui para pendukung dan simpatisannya kepada generasi muda dan dapat dikatakan lebih efektif bila dibandingkan dengan upaya sosialisasi Ideologi Pancasila yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Integrasi Politik yang mantap di Irian Jaya (Papua).³

Munculnya OPM sesungguhnya sebagai respons selain proses hukum tentang masuknya Irian Barat ke Papua yang mengalami distorsi, yang lebih kuat sesungguhnya adalah respons atas penderitaan rakyat Papua akibat penindasan

dan eksploitasi yang dilakukan secara keji oleh bangsa Indonesia yang sesungguhnya menjadi bangsa bermartabat seperti bangsa lain di dunia.⁴

Jatuhnya Rezim Orde Baru melahirkan pemerintahan Reformasi, dimana demokrasi dan kebebasan serta keadilan bagi kehidupan masyarakat berusaha untuk ditegakkan. Kebebasan berpendapat yang mengungkap “kebobrokan” Orde Baru kerap mewarnai aktifitas di awal pemerintahan Reformasi.

Dari gerakan masyarakat Papua sendiri aktifitas dan tujuan kemerdekaan bagi masa depan Papua kerap dimunculkan dalam setiap demonstrasi dan dialog-dialog baik forum nasional dengan pemerintah atau forum yang melibatkan perhatian internasional, terutama menyangkut pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Tanggal 1 Juli 1971 OPM yang dimotori Seth J. Rumkorem memproklamkan negara Papua Barat di markas Viktoria, kabupaten Jayapura dekat dengan perbatasan New Guinea sebelah utara. Hal ini di harapkan oleh para pemimpin pergerakan mampu dan dapat menciptakan semangat dan jiwa perjuangan untuk kebebasan papua.

Kurang mantapnya integrasi politik di Papua Barat disebabkan oleh tidak tepatnya “konsep pendekatan” serta “tema-tema” utama dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah RI di Papua Barat. Pemerintah RI kurang cepat dan kurang peka menangkap kehendak atau aspirasi masyarakat Irian Jaya (Papua Barat) dalam proses integrasi dengan Indonesia. Ketidaktepatan konsep pembangunan di Irian Jaya tersebut mengakibatkan lambatnya program meng-Indonesiakan orang-orang Irian Jaya (Papua Barat).

Ancaman disintegrasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tampaknya terkait dengan proses demokratisasi yang semakin terbuka dan liberal. Ikatan primordial seperti kesukuan, keagamaan, antara golongan telah dijadikan motif-motif yang mewarnai konflik kepentingan yang menimbulkan kerusuhan dan instabiliti.⁵

Salah satu persoalan yang menjadi *crusial point* setelah pembangunan 25 tahun pertama (PJP I) dimasa Orde Baru adalah masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan tertumpu di kawasan barat Indonesia saja. Hal ini telah menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan dalam segala aspek kehidupan yang berdampak pada *ketidakpuasan*.

Ketidakpuasan terhadap keadaan ekonomi yang buruk pada awal integrasi dan terutama pada tahun-tahun 1964 , 1965 dan 1966 dan juga terhadap sikap aparat pemerintah dan Keamanan yang tidak terpuji (terdapat dalam lampiran 21). Juga tidak puas terhadap sikap memandang rendah atau sikap menghina orang Irian yang sering sengaja ataupun tidak sengaja menggeneralisir keadaan suatu suku dengan suku-suku lainnya seperti: Pakai Koteka', "masih biadab", "Goblok, Jorok", dan lain sebagainya dimana pada masa pemerintahan Belanda ungkapan-ungkapan demikian tidak pernah atau dengan mudah diucapkan kepada orang Irian.

Hal inilah yang antara lain sebagai pemicu rakyat Irian Jaya (Papua Barat) atau OPM untuk melepaskan diri dari ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) dengan menggunakan bantuan dan dukungan dari Negara-negara internasional.

Sepanjang tahun 2000 sampai memasuki tahun 2001 gerakan OPM di Papua kelihatan mulai aktif kembali. Hal itu terlihat dari banyaknya pemberitaan mengenai OPM di media lokal maupun nasional, dan hampir sebagian besar berita mengenai gejolak sosial di Papua selalu di asosiasikan sebagai bagian dari OPM. Akibatnya berbagai aktivitas rakyat Papua untuk menuntut keadilan dan perhatian yang lebih secara ekonomi-politik, dan sosial-budaya dinyatakan sebagai kehendak OPM dengan sendirinya menjadi separatis.⁶

Kondisi politik diawal pemerintahan Reformasi terutama berpusat pada sikap pro dan kontra masyarakat terhadap kondisi yang terjadi selama era Orde Baru serta pengadilan masyarakat terhadap budaya korupsi, kolusi dan nepotisme orde baru. Kondisi ekonomi berusaha untuk dipulihkan walaupun secara perlahan-lahan dan membutuhkan waktu lama. Indonesia mulai melakukan pendekatan aktif terhadap IMF serta dunia internasional untuk meningkatkan kurs rupiah terhadap dollar. Disamping itu bagi masyarakat Indonesia sendiri diupayakan aksi “gerakan cinta rupiah” yang berusaha meningkatkan nilai mata uang rupiah.

Dampak dari semua itu kebebasan berpendapat dan beraspirasi semakin meningkat, demikian pula keinginan dari masyarakat pedalaman melepaskan diri dari kedaulatan RI juga semakin berkembang. Demonstrasi dan organisasi-organisasi beraliran separatisme semakin meningkat untuk melepaskan diri. Upaya dan solusi dari pemerintah sendiri banyak ditawarkan kepada masyarakat

⁶ George Junus Aditjondro, “Kibaran Sampari: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia”. ELSAM, Jakarta, 2001

tersebut, terutama disini adalah masyarakat Papua. Hal itu terus diupayakan pemerintah Indonesia, melalui beberapa pergantian pemimpin, dalam hal ini B.J Habibie, Gus Dur dan Megawati.

Munculnya tuntutan untuk merdeka dari sebagian rakyat papua lebih dikarenakan kekecewaan yang terlalu lama sehingga mereka menuntut keadilan atas hak-haknya. Untuk itu sebelum UU Otonomi Khusus keluar untuk propinsi Papua Barat (Irian Jaya), masyarakat papua di beri kesempatan untuk memberikan masukan terhadap apa yang mereka kehendaki.⁷Perbuatan elite politik lokal yang mendeklarasikan papua pisah dari RI sudah merupakan perbuatan nyata, bukan hanya niat belaka. Mereka secara terang-terangan dimuka umum telah menyatakan menganeksasi papua dari wilayah RI. Perbuatan demikian sudah merupakan tindakan makar yang dapat di jatuhi pidana.

Tanggal 26 Februari 1999, tim 100 (100 orang yang dikumpulkan dan bekerjasama dengan Pemda Irian Jaya) akan berbicara tentang bagaimana pembangunan Papua dalam segala bidang, karena selama ini papua mengalami ketertinggalan yang amat jauh dibandingkan daerah lain. Akan tetapi pernyataan yang disampaikan Thom Beanal adalah pernyataan untuk minta kemerdekaan bagi Papua. Tetapi saat itu ada beberapa tokoh langsung mengatakan bahwa tidak semua delegasi meminta kemerdekaan atas Papua.

Pernyataan tersebut intinya meminta keikhlasan Pemerintah Indonesia untuk melepaskan wilayah Papua. Yang isinya: *pertama*, agar pemerintah pusat melakukan koreksi atas apa yang dilakukan pada kita sebagai bangsa dan rakyat

⁷Lihat Tuhana , *op.cit.* hal. 2

Irian Jaya. *Kedua*, istilah "M" yang lebih mengacu pada kata merdeka mempunyai makna yang sangat luas yakni sebuah pembebasan. Dengan singkat tujuan mereka adalah usaha mencapai pembebasan dan memperoleh emansipasi sehingga terbebas dari dominasi dan dependensi.⁸

Pemerintah saat itu menyatakan, bahwa elite politik lokal yang mendeklarasikan kemerdekaan di Papua akan ditindak tegas. Maret 2001 Presiden Abdurrahman Wahid, memerintahkan pembubaran organisasi OPM itu sekaligus dengan sayap militernya. Perintah Abdurrahman Wahid ini tentu dianggap aneh oleh sebagian masyarakat Papua, karena *pertama* OPM tidak pernah menjadi organisasi politik terbuka dan resmi di Papua. Oleh karena itu langkah pembubarannya juga tidak mungkin bisa dilakukan. *Kedua*, kehadiran OPM tidak ditentukan oleh pengakuan resmi dari pemerintah melainkan oleh anggota-anggota dan pendukungnya sendiri yang tersebar dalam berbagai wilayah dan kelompok dengan segala keanekaragamannya dan dengan berbagai motivasi pula.

Dengan demikian, OPM bukanlah barang yang padu melainkan sebuah organ perjuangan yang cair. Dalam istilah George J. Aditjondro OPM adalah sebuah kawah candradimuka bagi banyak kalangan dalam menggodok nasionalisme Papua sekaligus menjadi alat dari tentara untuk naik pangkat.

Secara historis, status Irian Jaya sudah tuntas dan telah diakui dunia internasional. PBB telah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan RI atas Irian Jaya. Beberapa Negara lainnya juga telah memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Namun masih ada

⁸ Frans Maniagasi, *"Masa Depan Papua, Merdeka, Otonomi Khusus dan Dialog"*, Yayasan Studi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, Jakarta, Millenium Publsiher, 2001, hal.83

pula kekuatan asing yang memberikan dukungan kepada kaum separatis, baik berupa dana maupun pasokan senjata dan informasi intelijen.⁹

Kekuatan militer Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan militer Papua, akan tetapi dengan Bantuan-bantuan yang diberikan kekuatan asing terbilang sedikit merepotkan operasi militer Indonesia di Papua.

Penyelesaian separatisme menjadi urusan intern setiap negara yang tidak dapat diintervensi negara lain. Tindakan Pemerintah RI memerangi makar telah mendapat legitimasi dari hukum nasional dan internasional. PBB juga tidak dapat ikut campur tangan dalam menangani hal ini, kecuali hanya sebatas penengah bagi upaya penyelesaian damai.

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil satu pokok permasalahan yaitu : **“Apa upaya OPM untuk mendapatkan Dukungan Internasional untuk memerdekakan Papua?”**

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Dalam menyelesaikan suatu masalah, maka diperlukannya sebuah kerangka dasar berpikir yang berupa teori ataupun konsep sehingga penyelesaian masalah tersebut lebih bersifat ilmiah. Kata “Teori” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melihat atau memperhatikan”.¹⁰ Dengan arti lain berteori adalah

⁹ M.Khoidin, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar”*, Surabaya Post, 18 Januari 2001.

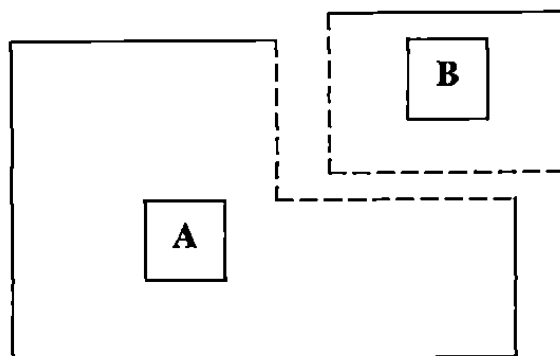
¹⁰ T.A. Coulombis dan J.H. Wolfe, *“Introduction to Internasional Relation”*, dalam Mochtar

“pekerjaan menonton” yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.¹¹ Dalam kasus ini teori yang akan dipergunakan adalah **Teori Separatisme dan Konsep Lobby dan Dukungan Internasional**.

Teori Separatisme

Teori ini menegaskan bahwa dalam sebuah negara terdapat suatu kelompok nasionalis yang mencoba melepaskan diri dari negara itu. Hal ini disebabkan rasa perbedaan yang berkembang menjadi gerakan separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah untuk membentuk sebuah negara tersendiri, atau tidak jauh dari bentuk ekstrem ini, sebatas otonomi internal yang bebas dari pengaturan negara induk.(dapat dilihat dalam tabel)¹². Tuntutan-tuntutan separatis biasanya ditolak pemerintah pusat karena tuntutan itu mengancam integritas politik dan wilayahnya. Itu sebabnya konflik di sekitar tuntutan separatis sering menjadi penyebab perang.

Tabel 1. Model Separatisme.



¹¹ *Ibid*

¹² Walter S. Jones, “*Logika Hubungan Internasional*”: kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional,

Separatisme memang menjadi masalah internasional yang cukup sensitif. Dari berbagai pengalaman internasional dapat dilihat bahwa *separatisme*, melewati tahapan-tahapan penting yang berbeda. Tahap pertama, separatisme muncul sebagai “gerakan politik”, tahap kedua, masuk kedalam tahap “politik militan”, yang dilakukan dalam bentuk pemogokan, boikot, protes massa besar-besaran. Tahap ketiga, fase konflik kekerasan atau pemberontakan bersenjata.¹³

Gerakan minoritas akan semakin penting apabila kekuasaan asing turut campur tangan. Kekuatan asing datang untuk membantu pemerintah pusat yang tengah terancam, sementara yang lain mendukung perlawanan minoritas. Campur tangan asing menjadi sangat penting bila suatu negara tetangga mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai tempat perlindungan dan pangkalan para gerilyawan dan organisasi politik kelompok yang tengah berotak. Hal ini dilihat oleh pemerintah pusat yang tengah terancam sebagai tindakan subversi dan cenderung menjurus menjadi konflik antar pemerintah.

Dalam kasus ini OPM (rakyat Papua) sebagai sebuah kekuatan, ingin melepaskan diri dari pemerintah Indonesia dengan pergolakan-pergolakan yang dilakukannya. Hal ini menjadi sebuah masalah yang dilematik bagi pemerintah Indonesia, karena Indonesia sudah dihadapkan pada masalah Aceh yang belum selesai sampai sekarang dan lepasnya Timor Timur dari tangan NKRI. Terlebih lagi Gerakan separatis OPM terbilang merupakan kasus yang sudah lama terjadi sejak masuknya Irian Jaya ke dalam NKRI.

¹³Nancy Danji M. *Separatisme: Sebuah Refleksi Internasional*. Surabaya: Pustaka, 05 Mei 2004

Konsep Lobby dan Dukungan Internasional

Dalam konsep ini ditegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat lebih propagandis, dalam lingkup internasional. Pendekatan ini berorientasi pada tindakan yang melibatkan masyarakat umum (internasional), dengan mengundang mereka untuk bergabung dalam advokasi atau lobi kampanye. Lobi itu sendiri berarti pendekatan secara tidak resmi dan dilakukan dengan cukup hati-hati dalam usaha mempengaruhi para pembuat keputusan (pemerintah atau pemimpin politik) agar merubah beberapa aspek kebijaksanaan maupun prakteknya.¹⁴

Sebuah kampanye yang cerdas dapat menggerakkan pendapat umum, tetapi tidak memiliki argumen yang kuat, para pengambil keputusan akan mudah menggugurkannya tidak lebih dari sebuah hawa panas. Lobi yang efektif merupakan sarana yang kuat dan semakin penting bagi NGO guna memperbesar dampak mereka terhadap masalah yang dihadapi.¹⁵

Dukungan Internasional disini merupakan sebuah fenomena politik dimana dengan bantuan ini diharapkan dapat terjadi sebuah perubahan atau penindaklanjutan terhadap keputusan/perjanjian internasional yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dalam perjanjian New York dan hasil dari PEPERA di tahun 1969.

OPM berusaha mencari dan mendapatkan sebuah bantuan berupa dukungan dari dunia internasional agar dapat memperoleh kemerdekaan bagi rakyat Papua. OPM merupakan sebuah kelompok yang terdiri masyarakat Papua

¹⁴ John Clark, "NGO dan Pembangunan Demokrasi", PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1995

itu sendiri yang berusaha melepaskan diri dari negara Indonesia dengan mendapatkan bantuan dari negara-negara luar yang biasa disebut sebagai gerakan separatis.

Dalam perspektif internasional, sekelompok rakyat (Papua) tidak bisa begitu saja menyerukan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari sebuah negara (Indonesia). Langkah itu tidak akan didukung oleh masyarakat internasional serta dianggap separatisme. Karena, sampai saat ini, persoalan Papua belum pernah dibicarakan atau diagendakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, dalam Badan Dekolonisasi PBB tak ada nama Papua yang harus diberi hak kemerdekaan.¹⁶

Resolusi PBB dan hukum internasional mengizinkan suatu bangsa untuk merdeka dari negara yang menduduki bangsa itu kalau perlakuan yang diterima sama atau lebih jahat dari perlakuan di jaman kolonialisme (tahun 1950-an ke belakang). Perlakuan Indonesia terhadap orang Papua adalah perlakuan kolonialisme dan hal itu merupakan alasan kuat untuk diajukan ke Mahkamah Internasional.

Sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa Papua sudah merdeka, dan bukan akan merdeka. Kemerdekaan itu dideklarasikan dan diakui secara politik dan hukum oleh penjajah Belanda pada tanggal 1 Desember 1961 dan dikukuhkan tanggal 1 Juli 1971 oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tidak ada hukum yang dapat mengganggu-gugat fakta sejarah ini, kapanpun juga dan dengan alasan apapun juga.

F. HIPOTESIS

Dari permasalahan yang ada, dan didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan dapat ditarik suatu hipotesa : bahwa upaya yang dilakukan oleh OPM mendapatkan dukungan dari dunia internasional untuk memerdekakan Papua adalah

- *Pertama*, dengan melakukan lobby ke negara-negara internasional, organisasi regional maupun internasional, masyarakat internasional dalam usaha mendapatkan dukungan untuk memerdekakan Papua.
- *Kedua*, kampanye politik dengan menyebarkan gagasan/perjuangan kemerdekaan Papua melalui media cetak (famlet/selebaran, buku, dan artikel) dan media elektronik (internet) secara intensif.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian terhadap suatu permasalahan sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal pokok dalam permasalahan yang sebenarnya. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka penelitian akan dibatasi pada perjuangan OPM sejak tahun 1951 sampai sekarang untuk memerdekakan Papua.

H. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku literatur, internet, jurnal dan surat kabar serta sumber-sumber lain yang dinilai relevan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumenter.

4. Teknik Analisa

Teknik analisa penulisan skripsi ini yaitu: mengumpulkan fakta, mengumpulkan data, klarifikasi data dan fakta, serta menganalisa data dan fakta.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Keseluruhan tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini ditulis ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Membahas tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II AKAR SEPARATISME DI PAPUA

Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah Irian Jaya, dan persengketaan Indonesia dan Belanda tentang Irian Jaya, serta proses masuknya Irian sebagai bagian dari Republik Indonesia, sampai pada kebijakan pemerintah terhadap gerakan separatis papua.

Bab III DIPLOMASI OPM DI DUNIA INTERNASIONAL

Dalam bab ini akan membahas tentang munculnya gerakan separatis oleh OPM dan juga akan dijelaskan tentang lobby OPM terhadap negara maupun kelompok internasional di dunia.

Bab IV KAMPANYE POLITIK OPM

Pada bab ini akan membahas tentang perjuangan politik OPM diluar negeri ataupun didalam negeri dalam bentuk kampanye yang dilakukan OPM untuk kemerdekaan Papua.

Bab V KESIMPULAN

Ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, isinya berupa kesimpulan dari bahasan-bahasan sebelumnya yang merupakan rangkuman kembali dari pokok-pokok bahasan yang telah disampaikan